

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini pengaruh atas empat variabel independen yang diteliti terhadap TPAK Perempuan pada 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2013-2022. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rata-rata sekolah perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Meningkatnya tahun pada rata-rata lama sekolah perempuan dapat meningkatkan persentase TPAK perempuan. Hal ini dikarenakan, pendidikan termasuk investasi untuk meningkatkan kualitas SDM. Lewat pendidikan, seseorang mampu memperbaiki kualitas dalam dirinya dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Semakin tinggi dan luasnya pengetahuan maka akan memperbesar peluang individu tersebut untuk turun ke angkatan kerja.
- b. Rata-rata upah perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Naik dan turunnya upah perempuan tidak dapat mempengaruhi persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Sulitnya tenaga kerja perempuan untuk mencari pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja perempuan membuat mereka tidak melihat upah sebagai faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan terjun ke pasar tenaga kerja.
- c. Kepala rumah tangga perempuan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap TPAK perempuan. Naik dan turunnya kepala rumah tangga perempuan tidak dapat mempengaruhi persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Ketidaksiapan dan rendahnya pendidikan KRT perempuan dalam menggantikan peran mencari nafkah membuat banyaknya KRT perempuan hanya memiliki pilihan untuk mendirikan usaha sendiri dan bekerja di sektor informal. Ketidakmampuan pemerintah dalam mendata tenaga kerja di sektor informal dapat menjadi salah satu faktor penyebab tidak berpengaruhnya variabel KRTP terhadap TPAKP.

- d. Pengeluaran per kapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Naik dan turunnya pengeluaran per kapita tidak dapat mempengaruhi persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini disebabkan 96 komoditas yang membentuk pengeluaran per kapita mayoritas diproduksi pada sektor formal. Pada kenyataannya sektor formal lebih didominasi oleh TPAK laki-laki sehingga pengeluaran per kapita tidak memiliki pengaruh langsung terhadap TPAK perempuan.
- e. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan (RLSP), Rata-Rata Upah Perempuan (RUP), Kepala Rumah Tangga (KRTP), dan Pengeluaran per Kapita (PPK) secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAKP).

## **5.2. Saran**

Didasari pada simpulan sebelumnya, sehingga terbentuk beberapa usulan yang dapat diberikan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

### **5.2.1. Saran Teoritis**

1. Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti tema yang sama yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, peneliti berikutnya dapat lebih memperdalam indikator variabel yang berpengaruh yaitu pendidikan. Peneliti selanjutnya dapat memakai variabel pelatihan, lamanya pengalaman dalam bekerja, akses terhadap teknologi dan internet, maupun perempuan menurut tingkat pendidikannya (SMA, Diploma, Sarjana) sebagai variabel yang mewakili pendidikan. Sehingga dapat dilihat lebih jelas dari banyaknya indikator pendidikan, indikator mana yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap TPAK perempuan di Indonesia.
2. Peneliti juga berharap pada penelitian selanjutnya dapat mengganti variabel upah menjadi curah jam kerja perempuan, sedangkan variabel Kepala Rumah Tangga Perempuan dapat digantikan oleh data penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dikarenakan pekerja informal lebih mendominasi tenaga kerja perempuan di Indonesia.

### 5.2.2. Saran Praktis

1. Pihak swasta ataupun perusahaan dapat membuka lowongan pekerjaan jenis paruh-waktu agar perempuan yang sedang mengurus keluarga tetap bisa terjun ke dunia pekerjaan, serta hendaknya perusahaan mendukung program ASI Eksklusif bagi ibu yang bekerja dengan menyediakan ruang menyusui yang layak.
2. Perusahaan juga dapat memperbanyak program CSR tidak hanya pada bidang keterampilan pengelolaan produk (membuat kue atau membuat batik), namun juga dapat berfokus pada bidang keterampilan bisnis seperti perencanaan biaya, pengembangan, dan pemasaran produk. Selain itu perusahaan dan pemerintah juga dapat berkolaborasi untuk memahami kebutuhan masyarakat (kekosongan) di pasar serta keunggulan SDA/SDM yang ada di masing-masing wilayah yang nantinya menjadi pertimbangan untuk perancangan pelatihan sebagai peluang wirausaha.
3. Pemerintah dapat memberikan sosialisasi hak pekerja bagi pekerja perempuan di sektor informal mengenai seberapa upah yang sepatutnya diterima (harga pasar), standar keselamatan pekerja, dan pembuatan kontrak pekerja agar tidak ada penyelewengan dalam pemberian upah, jam kerja, dan deskripsi pekerjaan.
4. Pemerintah juga dapat membentuk koperasi kredit (Credit Union) di setiap wilayah untuk membantu UMKM perempuan yang membutuhkan modal, melakukan pinjaman dengan bunga rendah, simpanan, atau pun berkonsultasi mengenai perkembangan usahanya.